



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB UNIT KERJA : BIDANG STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO SRI DARMINTO
2. Jabatan : KASI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAM
3. NHK : 210514

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/48 m2 di KOTA SEMARANG ,
HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 138.500.003

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 1
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 1
3. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1986,
WARISAN Rp. 1
4. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 125.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 12.000.000
6. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1986, HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 1.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 38.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 92.950.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 770.150.003

III. HUTANG Rp. 140.746.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

629.404.003

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 September 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.